

Analisis Komparatif *Financial Inclusion* sebelum dan sesudah *Branchless Banking*

Yayang Indriani, Nurdin

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

yayangindriyani97@gmail.com, nurdin@unisba.ac.id

Abstract—This study aims to analyze financial inclusion before and after the implementation of the program branchless the end of the year of conventional public on a bank who are actually enrolled in the Indonesia stock exchange (BEI). It was specifically this research wants to find out how 1) financial inclusion before branchless the end of the year 2) financial inclusion after enactment of branchless the end of the year 3) comparison financial inclusion before and after branchless the end of the year. Methods used in this research is that is ex-facto comparative research, this means that we are talking about stem from events are going on. And the researchers compare and analyze what happened. This study using the different paired with the sample t-test spss 21 and Microsoft Excel 2013 and engineering data collection method purposive sampling. The research results on all three dimensions dimensions penetration shows that there is a significant difference before and after the implementation of branchless banking and the two dimensional next and usefulness of which is the availability of shows that there is no significant differences between before and after the implementation of branchless banking.

Keywords—*Financial Inclusion, Branchless Banking, Test Different Paired Sample T-Test.*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *financial inclusion* sebelum dan sesudah implementasi program *branchless banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara lebih spesifik penelitian ini ingin mengetahui 1) *financial inclusion* sebelum *branchless banking*. 2) *financial inclusion* sesudah diterapkannya *branchless banking*. 3) Perbandingan *financial inclusion* sebelum dan sesudah *branchless banking*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif yang bersifat ex-facto, artinya metode ini berasal dari kejadian telah selesai terjadi. Lalu peneliti membandingkan dan menganalisis perbedaan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan uji beda *paired sample t-test* dengan program SPSS 21.0 dan Microsoft Excel 2013 dan teknik pengumpulan data dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian pada ketiga dimensi menunjukkan bahwa dimensi penetrasi terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah diterapkannya *branchless banking* dan kedua dimensi selanjutnya yaitu ketersediaan dan kegunaan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking*.

Kata kunci—*Financial Inclusion, Branchless Banking, Uji Beda Paired Sample T-Test.*

I. PENDAHULUAN

Dalam kondisi ekonomi yang dinamis di era globalisasi saat ini, Pemerintah sangatlah perlu dalam mengoptimalkan sumber daya seluruhnya untuk memberikan dorongan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ekonomi pada sektor keuangan. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam sektor keuangan yang dapat mewujudkan kondisi masyarakat ketika setiap anggota memiliki akses dalam memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai kesejahteraan atau yang sering disebut sebagai keuangan inklusif (OJK, 2017).

Sebagaimana diketahui bersama, sebelumnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menargetkan angka inklusi keuangan di 2019 sebesar 75%. Sedangkan, data terbaru yang diperoleh dari Bank Dunia melalui *Global Financial Inclusion Index* (Finindex) menyebutkan, orang dewasa yang telah memiliki rekening bank di Indonesia pada 2017 lalu hanya 48,9%. Untuk itu, diperlukan adanya terobosan model inklusi keuangan digital yang komprehensif dan tepat sasaran, dan juga bisa menjangkau seluruh pelosok desa dan pesisir nusantara. Sehingga target inklusi keuangan pada tahun 2019 tercapai. Ada dua hal besar masalah penyebab angka inklusi keuangan nasional masih belum optimal, yaitu terkait letak geografis yang luas serta rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, bangsa Indonesia terdiri dari Negara kepulauan yang sangat luas. Penduduk Indonesia tersebar di pelosok desa dan pesisir pantai yang kondisinya kurang tersentuh akses lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Selain karena letak geografis, persoalan inklusi keuangan nasional juga disebabkan minimnya literasi masyarakat atas produk dan jasa keuangan. Ini terkait dengan pemahaman yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta keterkaitan dengan jenis pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, diperlukannya terobosan model inklusi keuangan digital yang mampu menyentuh dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri (Sulistyo, 2019).

Adapun hambatan lain yang membuat perkembangan digital ekonomi terhambat, diantaranya yaitu kurangnya infrastruktur jaringan yang kurang luas sehingga semua orang belum dapat diakses oleh layanan perbankan.

Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya minat masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ekonomi digital. Baru sekitar 35% masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi melalui digital keuangan. Dan kontribusi bisnis di sektor digital masih minim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam mengatasi hal tersebut ada beberapa langkah yang dapat ditempuh, yakni perusahaan-perusahaan digital harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan jasanya.

Perbankan yang menjadi sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjadi roda perputaran dana di suatu Negara haruslah berkembang dan mengikuti kebutuhan pasar. Perbankan harus selalu menjadi pilihan utama individu selama melakukan kegiatan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam mencapai tujuan dan target tersebut, perbankan haruslah melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah nasabah untuk melakukan segala kegiatan ekonominya.

(<https://www.kompasiana.com/kelompok5top/5a0272ae9b1e67146d033532/masa-depan-industri-keuangan-perbankan-di-era-digital-ekonomi?page=all>, diakses pada tanggal 20 desember 2019).

Berdasarkan data dari badan pusat statistik jumlah bank umum di Indonesia pada tahun 2011 memiliki jumlah kantor bank sebanyak 24.580 bank, dan pada tahun 2012 terdapat 29.945, pada tahun 2013 sebesar 31.847, dan pada tahun 2014 sebesar 32.739, pada tahun 2015 sebesar 32.963, pada tahun 2016 sebesar 32.730 dan pada tahun 2017 sebesar 32.285 kantor bank. Dalam hal itu, jumlah kantor bank setiap tahunnya terbilang fluktuatif. Sehingga perbankan harus mengoptimalkan jasa perbankan dengan baik kepada masyarakat terutama yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked*).

Dalam hal itu, bukan hanya karena kesan layanan bank terlalu “tinggi”, sehingga masyarakat kelas bawah ragu untuk memiliki rekening bank atau dari soal prosedur administrasi bank yang dianggap terlalu rumit oleh masyarakat, sehingga enggan sebelum mencoba. Bagi kelompok masyarakat kategori miskin, persoalan image punya komplikasi tersendiri. Mereka adalah kelompok yang terlanjur mendapat stigma “tidak punya kartu identitas” atau dianggap “tidak ada yang bisa ditabung”. Sementara, akses ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup kerap kali terkait dengan “kelayakan” seseorang mendapatkan layanan perbankan. Selain orang miskin, para pedagang pasar atau wirausahawan pun sering terhalang dalam masalah kelayakan ini dari kategori mikro dan kecil di perkotaan. Kepemilikan rekening bank adalah salah satu indikator utama ketercetakan seseorang dalam sistem keuangan. (Bank Indonesia. 2013).

Oleh sebab itu, Lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dalam memobilisasi tabungan dan menyediakan layanan pembayaran yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. (Demiguc-Kunt, Honohan, & Beck, 2008). Sehingga masyarakat sangat perlu untuk mempunyai rekening bank. Maka perlu sebuah ide kreatif yang dapat membantu masyarakat agar tidak terhalang dalam memiliki

buku rekening bank untuk menjalankan sebuah transaksi digital dalam pencapaian keuangan yang inklusif.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah *branchless banking*. Salah satunya yaitu penelitian Munawarah (2018) tentang Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah *Branchless Banking* Pada PT. Bank Bri Syariah Indonesia. Menghasilkan penemuan bahwa rasio keuangan dalam bentuk FDR dan BOPO sebelum dan setelah penerapan *Branchless Banking* berbeda secara signifikan, sedangkan CAR dan ROA sebelum dan sesudah *Branchless Banking* tidak berbeda jauh.

Dampak *Branchless Banking* Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia penelitian terdahulu yang dilakukan Sarah, H. (2015) yaitu menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dari segi solvabilitas, efisiensi, dan profitabilitas menjadi lebih baik setelah adanya *Branchless Banking*. Namun ketika adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai APU dan PPT yaitu mengenai *Customer Due Diligence* yang dapat mengaburkan dampak positif *Branchless Banking* sehingga kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia menurun.

Menurut Chipeta dan Muthinja (2018) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan inovasi keuangan, kinerja perusahaan dan sektor perbankan Kenya melalui model *Branchless Banking*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan bahwa inovasi keuangan berkontribusi baik terhadap kinerja keuangan bank, dan bahwa faktor spesifik perusahaan lebih penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan saat ini daripada industri.

Inklusi keuangan merupakan suatu upaya untuk menghilangkan segala bentuk kendala dengan harga dan karakteristik non-harga pada akses publik untuk menggunakan layanan keuangan. Inklusi keuangan adalah sebuah strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang setara, kemiskinan pengurangan, dan stabilitas sistem keuangan. (Bank Indonesia. (2014).

Bagaimanapun Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada. Secara Makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. Di seluruh negara dan di semua tingkat pendapatan, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan oleh sistem keuangan formal. inklusi keuangan melibatkan perluasan akses ke masyarakat dalam sistem keuangan dengan biaya terjangkau. (Irmawati, Damelia, & Puspita,

2013)

Ada beberapa faktor kendala yang membuat inklusi keuangan menjadi sangat penting. Pertama, ketidakmampuan dalam mengakses jasa keuangan yang bisa menyebabkan entitas yang dikecualikan secara finansial untuk menangani sebagian besar uang tunai, dengan perusahaannya masalah petugas tentang menjaga keamanan. Kedua, kurangnya akses ke tabungan yang aman dan formal jalan bisa mengurangi insentif mereka untuk menabung. Ketika tabungan terjadi, tingkat keamanan dan suku bunga manfaat mungkin tidak sejauh tersedia dalam sistem formal. Tabungan tidak cukup bisa membuat rumah tangga bergantung pada sumber dana eksternal, pada saat dibutuhkan. Sering terjadi sumber-sumber ini tidak diatur dan memiliki tingkat bunga yang tinggi. Suku bunga tinggi dapat meningkatkan risiko gagal bayar oleh peminjam. Ketiga, kurangnya produk kredit berarti ketidakmampuan dalam melakukan investasi dan secara signifikan akan meningkatkan mata pencaharian mereka. Akibatnya, pengusaha kecil sering kali tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan lingkungan keuangan. Keempat, kurangnya produk pengiriman uang menyebabkan uang transfer menjadi rumit dan berisiko tinggi. Kelima, kurangnya produk asuransi berarti kekurangan peluang untuk manajemen risiko dan pemerataan kekayaan. (Shankar, 2013).

Dalam hal ini OJK mengeluarkan kebijakan Inovasi yaitu program laku pandai (*Branchless Banking*) untuk mendukung penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) yang didukung oleh penggunaan sarana teknologi dan informasi. Program Laku Pandai (*Branchless Banking*) ini bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat sesuai dengan apa dibutuhkan masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan anatarwilayah di Indonesia khususnya di desa dan kota.

Selain itu tidak hanya “menyederhanakan” kerumitan administrasi perbankan, “menghapus” jarak antara nasabah dengan kantor cabang bank, atau menghilangkan stigma bank terbatas untuk kalangan “*the have*”. Layanan perbankan tanpa kantor cabang bank juga bakal mengoptimalkan perkembangan teknologi telekomunikasi, yang sudah jauh menerobos batas geografis dan strata sosial. (Bank Indonesia, 2013).

Hal Ini telah meningkatkan kebutuhan bagi pemerintah untuk menciptakan konsep pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan memungkinkan semua segmen populasi mendapatkan manfaat untuk pertumbuhan tersebut. Kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, banyak negara berkembang termasuk Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan sektor keuangan sebagai inti dari agenda pembangunan (Bank

Indonesia, 2014).

Untuk mewujudkan program inklusi keuangan berkelanjutan, perlu ditutup koordinasi antara Bank Indonesia dan kementerian dan lembaga terkait untuk pengembangan, penetapan prioritas dan implementasi program, serta implementasi pemantauan dan evaluasi program. Dengan koordinasi yang erat, diharapkan dapat terpenuhi tujuan dalam meningkatkan akses publik ke layanan. (Bank Indonesia, 2014).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang ‘Analisis Komparatif *Financial Inclusion* sebelum dan sesudah *Branchless Banking* pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI’.

II. LANDASAN TEORI

A. *Financial Inclusion*

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada (Irmawati, Damelia, & Puspita, 2013).

1. Dimensi dalam Keuangan Inklusif

Pengukuran tingkat inklusi keuangan yang berdasarkan pada proporsi masyarakat yang mempunyai rekening perbankan hanya mengukur satu aspek dari inklusi keuangan, yaitu akses ke sistem keuangan, dan mengabaikan aspek yang lainnya, yaitu tingkat ketersediaan dan tingkat penggunaan sistem keuangan. Oleh karena itu, (Sarma, 2012) mengembangkan indeks inklusi keuangan atau *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang berdasarkan tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu penetrasi perbankan (*banking penetration*), ketersediaan jasa perbankan (*availability of banking service*), dan kemanfaatan atau kegunaan (*usage*) dari layanan perbankan.

- Dimensi Penetrasi Perbankan

Dimensi penetrasi perbankan menjelaskan salah satu ciri sistem keuangan yang inklusif adalah memiliki pengguna sebanyak mungkin. Jumlah masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan formal, misalnya proporsi populasi yang memiliki rekening di bank merupakan ukuran dari penetrasi perbankan. Hal ini menunjukkan masyarakat yang awareness (sadar) terhadap keuangan yang memanfaatkan produk atau jasa perbankan. Penetrasi

perbankan dapat diukur dengan jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) di bank per 1.000 populasi dewasa.

$$\text{Penetrasi Perbankan} = \frac{\text{jumlah rekening DPK}}{\text{jumlah populasi dewasa}} \times 1.000$$

• Dimensi Ketersediaan Layanan Perbankan

Dalam sistem keuangan yang inklusif, ketersediaan layanan perbankan harus tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat dengan mudah. ketersediaan layanan perbankan adalah jumlah cabang lembaga keuangan, jumlah ATM (Automatic Teller Machine) atau ketersediaan layanan keuangan melalui mobile banking dan internet banking. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat dengan mudah menjangkau layanan keuangan. Tingkat ketersediaan layanan keuangan diukur dengan jumlah kantor perbankan atau jumlah ATM dibagi jumlah populasi dewasa, misalnya jumlah kantor bank (yang meliputi kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), kantor kas, kas mobil, dan payment point) per 100.000 penduduk dewasa.

$$\text{ketersediaan} = \frac{\text{jumlah kantor bank}}{\text{penduduk dewasa}} \times 100.000$$

• Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan

Meskipun telah memiliki rekening pada lembaga keuangan formal, masih terdapat kelompok orang yang belum bisa memanfaatkan keberadaan jasa keuangan secara optimal. Oleh karena itu, memiliki rekening saja tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif. Sistem yang inklusif ini ditunjukkan dengan penggunaan produk keuangan formal, seperti tabungan kredit, pembayaran, remitansi, dan transfer. Tingkat kegunaan tersebut dapat diukur dengan (jumlah pinjaman dari bank umum dan jumlah deposit) terhadap PDB.

$$\text{kegunaan} = \frac{\text{jumlah pinjaman dari bank umum} + \text{jumlah deposit}}{\text{PDB}}$$

B. *Branchless Banking*

Menurut Departemen Penelitian dan Pengaturan perbankan OJK, *Branchless Banking* atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) merupakan suatu program penyedia layanan jasa keuangan dan perbankan yang melakukan kerjasama dengan pihak lain atau disebut pihak ketiga yang didukung oleh penggunaan sarana teknologi dan informasi. Dengan adanya program *Branchless Banking* ini akan berpotensi agar dapat meminimalisir biaya dan justru akan meningkatkan layanan keuangan perbankan tanpa harus ada kantor fisik yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dan juga menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan penduduk (Sarah, 2015).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pembahasan Financial Inclusion Sebelum dan Sesudah Penerapan Branchless Banking Menggunakan Uji Paired Sample T-test*

		Paired Differences				T	Df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Penetrasi_Sebelum - Penetrasi_Sesudah	-134.14210	125.64653	28.09542	-192.94648	-75.33772	4.775	.000	
Pair 2	Ketersediaan_Sebelum - Ketersediaan_sesudah	-.19600	.29378	.06569	-.33350	-.05850	2.984	.008	
Pair 3	Kegunaan_Sebelum - Kegunaan_sesudah	-	111236.18584	24873.16731	-	29865.06049	-.892	.383	

Sumber : Data yang telah diolah (2019)

Gambar 1. Uji Paired Sample T-test

1. Analisis Perbandingan Penetrasi Perbankan Sebelum dan Sesudah *Branchless Banking*

Dalam pengujian hipotesis pada penetrasi perbankan sebelum dan sesudah *branchless banking*, terdapat ketentuan dasar dalam hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat perbedaan antara penetrasi perbankan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking* pada tahun 2011-2018.

Ha : Terdapat perbedaan antara penetrasi perbankan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking* pada tahun 2011-2018.

Dalam pengambilan keputusan ada pengujian hipotesis berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

- Jika nilai sig. > 0,05 maka Ho diterima.
- Jika nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak.

Berdasarkan *output* pengujian hipotesis dengan uji *paired sample t-test* seperti pada tabel diatas diperoleh bahwa nilai penetrasi perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya program *branchless banking* menghasilkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dibanding 0,05 dengan demikian Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penetrasi perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking*. Sedangkan jika dilihat dari t-hitung pada penetrasi perbankan sebelum dan sesudah diterapkan program *branchless banking* yaitu sebesar -4,775 dengan df = 19, dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.72913. Oleh karena itu dikarenakan t-hitung $-4,775 > 1.72913$ maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penetrasi perbankan sebelum dan sesudah penerapan program *branchless banking*.

2. Analisis Perbandingan Ketersediaan Layanan Perbankan Sebelum dan Sesudah *Branchless Banking*

Ketersediaan layanan perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya program *branchless banking* menghasilkan nilai dengan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,008 itu artinya lebih besar dibanding 0,05 dengan demikian Ho diterima

yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketersediaan layanan perbankan sebelum dan sesudah penerapan *branchless banking*. Sedangkan jika dilihat dari t-hitung pada ketersediaan layanan perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking* yaitu sebesar -2,984 dengan df 19, dan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.72913. Oleh karena itu, dikarenakan t-hitung $-2,984 > 1.72913$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara ketersediaan layanan perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking*.

3. Analisis Perbandingan Kegunaan Jasa Perbankan Sebelum dan Sesudah *Branchless Banking*

Kegunaan layanan perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking* diperoleh nilai sig (*2-tailed*) sebesar 0,383 itu artinya lebih besar dibanding nilai probabilitas yaitu 0,05 dengan demikian H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kegunaan sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking*. Sedangkan jika dilihat dari t-hitung yang menghasilkan nilai sebesar -0,892 dengan df = 19 dengan nilai signifikansi ($\alpha = 5\%$) maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.72913. Oleh karena itu nilai t-hitung diperoleh nilai sebesar -0,892 yang lebih kecil dari t-tabel yaitu 1.72913 maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kegunaan jasa perbankan sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan financial inclusion sebelum dan sesudah penerapan program Branchless Banking periode waktu 2011-2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Penetrasi perbankan sebelum penerapan *branchless banking* menghasilkan rata-rata yang dihasilkan mulai dari BBRI, BMRI, BBKA, BBNI, BBTN secara berturut-turut yaitu sebesar 0.87, 1.09, 0.58, 0.26, dan 0.40. Rata-rata ketersediaan layanan perbankan sebelum penerapan *branchless banking* menghasilkan angka sebesar Jumlah rata-rata yang dihasilkan mulai dari BBRI, BMRI, BBKA, BBNI, BBTN secara berturut-turut yaitu sebesar 0.87, 1.09, 0.58, 0.26, dan 0.40. Sedangkan kegunaan jasa perbankan sebelum penerapan *branchless banking* menghasilkan rata-rata yang dihasilkan mulai dari BBRI, BMRI, BBKA, BBNI, BBTN secara berturut-turut yaitu sebesar 190909.01, 150864.39, 76005.59, 85364.46, 45065.86.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Penetrasi Perbankan meningkat setelah diterapkannya program *branchless banking*. Rata-rata Ketersediaan Layanan Keuangan meningkat setelah diterapkannya program *branchless banking*

- dan rata – rata Kegunaan Jasa Perbankan meningkat setelah diterapkannya program *branchless banking*.
3. Berdasarkan analisis perbandingan pada ketiga dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan keuangan, dan kegunaan jasa perbankan yang dilakukan pada bank yang menjadi objek penelitian sebelum dan setelah diterapkannya program *branchless banking* pada periode 2011-2014 (sebelum diterapkan *branchless banking*) dan periode 2015-2018 (sesudah diterapkannya *branchless banking*) menunjukkan bahwa dimensi penetrasi perbankan dan ketersediaan layanan perbankan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah diterapkannya *branchless banking* dan dimensi kegunaan jasa perbankan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya *branchless banking*.

• Saran

1. Bagi Perusahaan

Untuk dapat meningkatkan keuangan yang inklusif, maka perlu dilakukannya dengan memulai memperkenalkan akan kepentingan pengetahuan mengenai layanan perbankan dan jasa perbankan dari masa remaja di kalangan pelajar. Hal ini sangat penting karena untuk pada jaman sekarang dan dimasa yang akan datang mereka akan menjadi orang dewasa yang membutuhkan layanan jasa keuangan. Dengan memperkenalkan dari sejak dini maka itu akan sangat mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi strategi keuangan yang inklusif.

Untuk meningkatkan ketersediaan dan kegunaan jasa perbankan berdasarkan keuangan yang inklusif, maka perlu dilakukan dalam menambah jumlah agen bank serta memberikan fasilitas untuk melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang produk dan layanan perbankan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan objek dan variabel penelitian yang berbeda dengan menambahkan atau mengganti variabel, serta diharapkan untuk menambah sampel penelitian lebih dari perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Demiguc-Kunt, A., Honohan, P., & Beck, T. (2008). Finance for all? : Policies and Pitfalls in Expanding Access. World Bank.
- [2] Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan. JEJAKv: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 6 (2).
- [3] OJK. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved desember kams, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>
- [4] Sarah, H. (2015). Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Al-Muzara'ah, 3 (2), 136-157.

- [5] Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion - A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, no 7.
- [6] Shankar, S. (2013). financial inclusion in india : Do microfinance institutions address access barriers. *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspective*, 2 (1), 60-74.
- [7] Sulistyono, C. B. (2019, juli senin). *Harian Kontan*. Retrieved Desember 12, 2019, from Tri Adi: <https://analisis.kontan.co.id/news/pr-inklusi-keuangan-pemerintah-2019-2024?page=2>
- [8] Sunjoto, R. S., Carolina, Magdalena, & Kurniawan. (2013). *Aplikasi SPSS untuk smart riset*. Bandung: Alfa Beta.
- [9] UMKM, D. P. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- [10] Wibowo, P. P. (2013). *Branchless Banking Setelah Multilicense :Ancaman atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- [11] <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>
- [12] <https://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=inklusi%20keuangan>
- [13] <https://www.bps.go.id/>